TAJUK RENCANA

Penyimpangan Seks Remaja

GEGER penyimpangan seksual, di kalangan pelajar di Purworejo menyadarkan, bahwa ada masalah yang terjadi terjadi di kalangan remaja di bawah usia 21 tahun. (KR 14/2). Menurut keterangan Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo, awalnya menemukan praktek penyimpangan seksual remaja hanya 2 pasang. Namun setelah ditelusuri, ternyata jumlahnya makin banyak.

Karena itulah, Pemkab Purworejo mengadakan sosialisasi kepada remaja mengenai bahayanya Narkoba, HIV Aids dan penyimpangan seks. Penyimpangan perilaku seksual, bukan hanya seks bebas yang sangat berbahaya. Namun ada sejumlah penyimpangan yang terjadi di kalangan remaja, karena itulah orangtua harus tahu dan mengawasinya.

Para ahli mengatakan penyimpangan perilaku seksual remaja diantaranya (1) Gangguan identias Gender (Gender Identity Disorder). Masalah ini adalah konflik batin remaja karena anatomi gender yang dimiliki dengan orang lain. Ini sering menjadi sumber stress intensif, karena anak tersebut menolak miliknya sendiri. Maka sering di ekspresikan ingin memakai pakaian bukan gendernya. (2) Fetishisme, yakni ketergantungan pada benda-benda mati. Benda-benda mati inilah yang yang menimbulkan gairah seksual. Gairal ini dalam psikologi disebut abnormal.

Fetishisme yang merupakan ketergantungan kepada benda-benda mati yang dapat menimbulkan gairah seksual pada seseorang, masuk ke dalam kategori parafilia, suatu gangguan seksual dalam psikologi disebut abnormal. Parafilia yaitu penyimpangan pada hal - hal yang membuat seseorang tertarik, namun ketertarikan tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya. Gangguan ini terjadi berulang dan intens setidaknya dalam waktu enam bulan dengan adanya fantasi, dorongan atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual penggunaan benda benda mati.

Kemudian (3) adalah Fetishisme Transvetik. Yakni gairah seksual yang meledak-meledak untuk mengenakan pakaian yang bukan gendernya. Kondisi ini jelas kategori abnormal. Meski mengenakan pakaiannya bukan gendernya itu tidak sepanjang hari, hanya sesaat saja, tetapi tentu tidak bagus untuk perkembangan psikologisnya. (4) adalah yang disebut dengan Voyeurisme. Yakni kepuasan seseorang remaja secara seksual melihat orang lain tanpa busana atau sedang melakukan hubungan seksual. Hal ini awalnya karena keinginan tahu seorang remaja yang sangat tinggi. Para ahli menyebutkan, bahwa voyeurism inilah yang menyebabkan terjadinya LGBT dan sebagainya. (5) Froterisme, adalah gangguan seks yang berkaitan dengan upaya menyentuh secara seksual pada bagian tubuh orang lain, dan sama sekali orang lain tak akan menduga.

Dengan melihat hal tersebut, maka sejak dini orangtua sangat perlu mengajaran anak-anak dengan gaya pendekatan yang santai. Ajaklah diskusi dengan gaya dan bahasa remaja untuk menjelaskan tentang fungsi organ kelamin dan bahayanya seks bebas.

Sudah berapa kali terungkap kasus remaja yang hamil diam-diam karena seks bebas, dan membuang bayinya lantaran pria tidak bertangungjawab dan berakhir di bui karena pembunuhan bayinya sendiri. Sudah sering diberitakan juga remaja yang memperkosa gadis, sehingga juga harus berakhir di bui.

Perkembangan teknologi informasi, media sosial yang gampang sekali mencari konten porno, mudah didapatkan. Karena itulah tindakan Satpol PP Purworejo yang berhasil menemukan kasus penyimpangan remaja, kemudian menindak lanjuti dengan sosialisasi di kalangan remaja sangat menarik.

Peristiwa serupa bisa terjadi dik sejumnlah tempat, ketika perkembangan media sosial begtui pesat dan ketika kita tidak bijak menggunakannya. Apalagi ditambah perkembangan narkoba yang diam-diam juga tetap ada. Ibarat gunung es yang tidak terlihat, namun sebenarnya lebih besar. **(***)**

Pesantren & Kebijakan Lokalitas

Oleh: Yuniar Riza Hakiki

PESANTREN mempunyai kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pesantren menjadi salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memegang teguh ajaran *Islam rahmatan lilíalamin* serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren senantiasa menyiapkan para santri untuk bisa berbaur dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan akhlak yang sesuai nilai-nilai agama. Karenanya, eksistensi pesantren sangat penting dalam pembangunan bangsa, baik dalam bidang pendidikan, keagamaan, maupun moral masyarakat melalui perannya dalam menyemai nilai-nilai keagamaan. Bahkan di masa kini, jamak pesantren yang tengah berinovasi menyesuaikan perkembangan teknologi dan ekonomi agar tidak tergerus oleh transformasi sosial.

Pesantren DIY

Istimewanya, pesantren di DIY mempunyai kekhasan tersendiri, yakni sebagai bagian dari pelestari nilai-nilai budaya Ngayogyakarta yang terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari di pesantren (Muíammar, 2014). Dari sisi historis pesantren juga tak hanya identik dengan makna keislaman, tapi juga mengandung nilai kebudayaan asli Indonesia.

Tidak berlebihan bila dikatakan pesantren di DIY merupakan warisan budaya dan kekuatan budaya khas Ngayogyakarta. Terlihat dari eksistensi pesantren yang menyelaraskan, menyimbangkan dan melestarikan budaya DIY. Terbukti pada warisan pathok negara, bahkan salah satu pesantren berada tepat di garis imajiner yang membentuk keselarasan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Pesantren di DIY juga bisa dikatakan mempunyai hubungan kekerabatan dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Hubungan kekerabatan, bila ditarik jauh dengan mempertemukan hubungan pesantren dengan Pangeran Diponegoro. Kolaborasi antara Kraton dan pesantren kian terjalin dan diharapkan terus lestari. Apalagi di Kraton juga terdapat manuskrip yang ditulis menggunakan huruf Arab Pegon.

Karena eksistensinya amat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sejak dahulu hingga di masa depan pesantren akan terus menjadi pelaku pembangunan

KR-JOKO SANTOSO

melalui fungsi pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat. Bahkan, pesantren di DIY juga mempunyai fungsi kebudayaan sebagai bagian dari keistimewaan DIY. Menjadi kurang pas bila Pemerintah dan Pemerintah Daerah selaku pemangku kebijakan tidak menaruh perhatian terhadap aset pembangunan ini.

Kebijakan Lokalitas

Senafas dengan UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren), Pemerintah Daerah dilekati peran untuk memberi dukungan dan fasilitasi kepada pesantren. UU Pesantren memberi porsi kewenangan kepada Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk memberi dukungan dan fasilitasi kepada pesantren dalam menjalankan fungsinya, sekaligus melekati kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai penyelenggaraan pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengakomodasi filosofi dan kekhasan pesantren di DIY, amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kebutuhan hukum atas kebijakan dukungan dan fasilitasi pesantren maka penting bagi Pemerintah Daerah DIY untuk mempertimbangkan peraturan daerah mengenai fasilitasi/dukungan Pesantren. Kebijakan ini akan turut menjadi pelaksana UU Keistimewaan DIY dan UU tentang Pesantren. Selain itu juga akan melengkapi Perda Istimewa DIY tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Apalagi di DIY belum ada perda yang secara spesifik mengatur mengenai kepesantrenan, terlebih dalam hal kedudukan pesantren sebagai warisan budaya dan kekuatan budaya di DIY.

Yang perlu diperhatikan, perda tidak boleh menjangkau urusan kemandirian Pesantren. Sebab pesantren mempunyai otonomi/kemandirian dalam mengelola rumah tangga sebagai bagian dari kekhasannya. Perda justru harus menjamin kemandirian pesantren, dan lebih mengatur standar, prosedur dan kriteria dukungan dan fasilitasi yang akan diberikan Pemerintah Daerah kepada Pesantren. Dengan demikian, pada satu sisi pesantren akan semakin optimal dalam menyelenggarakan fungsinya, dan pada sisi yang lain pesantren tetap terjamin otonomi/kemandiriannya. ❑

) **Yuniar Riza Hakiki SH MH, Peneliti PSHK UII & Tim Hukum PWNU DIY.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat.* Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.
Naskah tidak berisi ujaran kebencian,SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Pengelolaan Sampah Harus Jadi Isu Strategis

PERSOALAN sampah sudah tidak bisa dianggap remeh. Dari pemberitaan di media massa, kondisi TPA Piyungan sudah overload dan idealnya tidak lagi menerima setoran sampah dari berbagai daerah. Jika terus dipaksakan tanpa ada solusi, sewaktu-waktu bisa menjadi persoalan serius. Bisa dilihat ketika dalam sehari saja TPA Piyungan ditutup untuk kebutuhan maintenance, tumpukan sampah di berbagai TPS maupun depo langsung menggunung. Terutama bagi Kota Yogyakarta yang selama ini sangat mengandalkan TPA Piyungan.

Baik masyarakat maupun pemerintah, harus menjadikan pengelolaan sampah sebagai isu strategis. Setidaknya ada upaya jangka pendek, menengah dan panjang agar tidak lagi menjadikan TPA Piyungan sebagai andalan pembuangan sampah. Dengan menjadikannya sebagai isu strategis, pengelolaan sampah seharusnya mendapat porsi anggaran. Tidak hanya untuk penyediaan lokasi pembuangan akhir maupun pengadaan teknologi pengolahan sampah mutakhir hingga kebutuhan armada pengangkut sampah, melainkan kegiatan pendampingan di masyarakat.

Untuk mencari lahan baru layaknya di TPA Piyungan memang bukan perkara mudah. Begitu pula teknologi pengolahan sampah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi hal itu perlu segera diputuskan oleh pemerintah. Apalagi dalam sehari produksi sampah dari masyarakat tidak pernah terputus. Ratusan bahkan ribuan ton sampah per hari harus segera ditangani. Sehingga tidak ada kata lain perlu ada solusi yang lebih serius dan pasti terkait pengolahan sampah di tingkat hilir.

Sedangkan dari hulu atau produsen sampah, masyarakat harus memiliki paradigma baru dalam melihat sampah. Selama ini gerakan untuk pengurangan sampah maupun pendayagunaan sampah agar tidak dibuang ke TPS masih cukup lemah. Jika perlu, dibentuk tim khusus yang setiap hari memberikan sosialisasi dan pendampingan di masyarakat. Paling tidak warga memiliki pemahaman bahwa tidak semua sampah harus dibuang ke TPS.

Jangan sampai sampah menjadi bom waktu ketika TPA Piyungan akhirnya berhenti beroperasi dan tidak ada lahan lain yang menjadi pengganti. Yogyakarta sebagai kota wisata tentu tidak ingin menyuguhi wisatawan dengan panorama dan bau tidak sedap akibat tumpukan sampah yang tidak terangkut.

***Agung Kritiyanto,** Warga Gambiran Umbulharjo.*

Relokasi PKL Malioboro, Kebijakan untuk Semua

Alimansyah

RELOKASI Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro sejak 1 Februari 2022 ke Teras Malioboro 1 dan 2, sudah dilaksanakan. Namun, meski sudah direncanakan matang dan proses perpindahan selama satu pekan, masih ditemukan berbagai kendala, seperti adanya usulan untuk penundaan relokasi dan perlunya perbaikan-perbaikan fasilitas yang ada. Tetapi secara umum kebijakan ini dapat dikatakan lancar dan sukses.

Kini Malioboro banyak perubahan yang dapat dirasakan manfaatnya, terutama oleh para pedestrian. Malioboro saat ini terasa luas, tertata rapi, toko-toko yang ada dapat dilihat langsung, taman yang sudah ada selama ini terlihat asri dan indah sehingga menambah kenyamanan Malioboro untuk bersantai dan berselfi ria.

Selain itu, Teras Malioboro 1 dan 2 yang menjadi lokasi baru para pedagang exs PKL, telah menjadi icon baru tujuan wisatawan, baik pagi, siang, sore maupun malam hari untuk mencari sarapan, kuliner khas angkringan, oleh-oleh dan kuliner lesehan. Dikunjungi para pembeli wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Kini terlihat kondisi Malioboro yang lebih baik.

Sebagai provinsi yang menjadi tujuan wisata nomor 2 di Indonesia dan menjadi destinasi tujuan wisata dunia, tentu Yogyakarta harus selalu berbenah dan menyesuaikan diri sesuai perubahan zaman.

Ada empat alasan utama kebijakan relokasi : pertama, Saat ini momentum tepat untuk penataan kawasan Malioboro yang kini dari ujung utara hingga selatan sudah bersolek dengan jalur pedestriannya. Kedua, Relokasi PKL Malioboro merupakan hal yang tak bisa dihindari karena para pedagang selama ini memang menempati lokasi bukan sesuai peruntukkannya. Ketiga, relokasi bertujuan untuk mengembangkan sistem jaringan pejalan kaki yang berkualitas di kawasan pedestrian serta membuka aksesibilitas jalan Malioboro dan jalan Margo Mulya sebagai pusat pelayanan kota. Keempat, relokasi ini dalam upaya mendukung rencana kerjasama Pemda DIY dengan UNESCO, yaitu Yogya tengah mengusulkan kawasan Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia ke UNESCO.

Sumbu Filosofi sendiri merupakan garis imajiner lurus yang menyambungkan Tugu-Kraton-Panggung Krapyak, termasuk Malioboro di dalamnya. Juni nanti tim UNESCO akan datang ke Yogyakarta untuk melakukan verifikasi atas usulan itu. ìSaya tak mau dinilai melanggar hukum, dengan membuat kerjasama dengan UNESCO, tapi di dalam kerjasama itu saya justru membiarkan lahan trotoar area pertokoan untuk pejalan kaki dipakai PKL," kata Sultan kepada wartawan. Berdasar keempat alasan di atas diharapkan Yogya menjadi kawasan Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia dan senantiasa menjadi destinasi wisata dunia..

Suksesnya relokasi PKL Malioboro tak terlepas dari Kebijakan Regulatif dan Distributif Pemprov DIY dan Pemkot Yogyakarta. Kebijakan regulatif telah memberikan hak warga untuk mendapatkan yang seharusnya. Kebijakan ini bermanfaat baik bagi pemilik toko, pejalan kaki dan PKL sendiri yang naik kelas menjadi pedagang Teras Malioboro yang juga menjadi bagian Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia. Selain itu, kebijakan distributif berupa penyiapan tempat, fasilitas bagi exs PKL yang direlokasi ke Teras Malioboro 1 dan 2 yang sangat representatif, humanis dan tanpa membebankan para PKL yang hanya tinggal pindah ke tempat yang baru.

Akhirnya bahwa kebijakan Relokasi PKL malioboro merupakan kebijakan yang visioner dan berkesinambungan untuk masa yang akan datang yang lebih baik, kebijakan yang dapat mendistribusikan hak semua *stake holder* pada posisi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi dan kepentingan masing-masing tanpa ada yang dirugikan sehingga pantas apabila Kebijakan Relokasi PKL Malioboro ini disebut Kebijakan untuk semua. ❑

***Alimansyah,** Dosen Administrasi Publik Universitas Bengkulu. Mahasiswa Doktoral Manajemen & Kebijakan Publik FISIPOL UGM.*

Pojok KR

KNKT ungkap penyebab kecelakaan bukit bego.

-- Faktor manusia tetap yang utama.

Aturan pencairan JHT setelah usia 56, jadi perhatian.

-- Kurang pas untuk masa-masa sekarang.

Hujan lebat, sejumlah tebing di DIY longsor.

-- Waspadai lokasi lain.

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.